

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik mempunyai hubungan erat dengan penerapan dan perlakuan pada sektor publik yang memiliki cakupan wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah pada sektor publik tidak hanya disebabkan oleh keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut (Astuti dan Icoh, 2014).

Memberikan dan membangun persepsi yang baik merupakan sebuah keutamaan dalam sektor publik maupun pemerintah. Setelah reformasi, perkembangan sektor publik di Indonesia dituntut untuk menguatkan keakuntabilitas lembaga-lembaga public secara menyeluruh, baik yang berada di pusat dan di daerah (Mardiasmo,2006). Akuntabilitas sendiri diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilakukan secara periodik. Instansi pemerintah diharuskan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Laporan keuangan dijadikan sebagai media utama dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat, dengan cara menyusun laporan keuangan secara mandiri. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab penyimpangan atau kecurangan (Ardianingsih, Ardiyani dan Adi, 2016).

Fenomena yang berhubungan dengan kecurangan (fraud) telah menarik banyak perhatian dikalangan media dan menjadi isu yang menonjol baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintah (Mardiasmo, 2006). Kecurangan yang marak terjadi pada sektor pemerintah akhir-akhir ini adalah tindak korupsi. Membahas korupsi di Indonesia sama halnya membahas jalan yang tidak berujung. Perilaku dari oknum-oknum pemerintahan bukannya hilang dan berkurang akan tetapi kian menjadi dan merajalela. khususnya pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara.

Berdasarkan data *infokorupsi.com* terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Jepara. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah korupsi penyimpangan dana APBD oleh mantan ketua DPRD pada tahun 2004 senilai 7,8 miliar. Kasus lain yang terjadi adalah kasus penahanan empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat kasus korupsi pertanggungjawaban fiktif proyek pemeliharaan jalan tahun anggaran 2009. Korupsi atas proyek pemeliharaan jalan tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar 2,5 miliar. Sedangkan kasus terbaru adalah korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2012. Dana tersebut diterima dua kali pada tahun 2011-2012 senilai 149 juta rupiah.

Korupsi (Corruption) merupakan jenis kecurangan yang paling sulit untuk dideteksi hal ini disebabkan karena menyangkut bukannya hanya satu individu melainkan kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana hal tersebut merupakan jenis kecurangan terbanyak yang terjadi pada negara-negara berkembang yang dari segi penegakan hukumnya masih lemah dan kurang

kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan Christofel (2010) dalam Riris (2016). Korupsi merupakan jenis fraud yang sering dilakukan oleh seseorang dengan jabatan atau wewenang yang tinggi pada suatu perusahaan. Frekuensi fraud jenis ini lebih jarang dibandingkan dengan asset akan tetapi lebih merugikan perusahaan dikarenakan nominalnya yang relatif lebih tinggi.

Kecurangan sering dikaitkan dengan keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural dan komitmen organisasi. Keefektifan pengendalian internal penting dilakukan dalam pelaksanaan suatu Kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan maupun instansi. Pengendalian internal yang tidak efektif dapat memberikan kesempatan terhadap pegawai untuk melakukan tindakan yang menyimpang atau kecurangan dengan cara memanfaatkan ketidak efektifan pengendalian internal sebagai suatu kelemahan perusahaan untuk melakukan kecurangan (fraud) (Mahmudi: 2011). Pengendalian internal yang baik diharapkan mampu meminimalisir terjadinya asimetri informasi.

Kondisi asimetri informasi dapat memberikan kesempatan bagi pegawai untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak sebenarnya (Hanafi, 2004). Terjadinya asimetri informasi dapat diminimalkan dengan memberikan reward berupa kompensasi kepada pegawai. Pemberian kompensasi yang sesuai dapat mempengaruhi tindakan dan kinerja pegawai, hal tersebut diharapkan agar pegawai merasa tercukupi sehingga akan mengakibatkan kinerja pegawai dan mengurangi tindak kecurangan (fraud). Pemberian gaji atau kompensasi yang

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi pegawai yang dan mengurangi tindak kecurangan (fraud).

Dalam pemerintah daerah penegakan hukum harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam rangka memajukan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penegakan hukum yang berkaitan dengan peraturan dan undang-undang dirasa mampu untuk mengendalikan pemerintah daerah agar pengelolaan APBD dapat berjalan transparan sesuai dengan kepentingan publik. Pengelolaan anggaran yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat memungkinkan terjadinya kecurangan dari orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan anggaran tersebut (Ardianingsih, Ardiyani dan Adi, 2016).

Kesesuaian kompensasi menurut Wexley dan Yuki (2003) dalam Riris (2016), mengatakan jika ketidakpuasan terjadi karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan dapat memberikan peluang terjadinya pencurian oleh para pekerja, seperti mencuri uang, peralatan, serta pesedian barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai yang mengalami ketidakpuasan dengan kompensasi yang di dapat akan cenderung mencari penghasilan lain. Didukung oleh penelitian Sulistyowati (2007), jika kepuasan kompensasi didasarkan pada ide bahwa seseorang akan terpuaskan dengan kompensasinya, ketika persepsi terhadap kompensasi dan apa yang mereka pikirkan sesuai dengan semestinya. Sehingga dapat diasumsikan, semakin rendah

kepuasan kompensasi yang diterima maka semakin tinggi terjadinya tingkat korupsi.

Keadilan procedural merupakan persepsi keadilan terhadap suatu prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan organisasi sehingga setiap anggota organisasi merasa terlibat didalamnya (Budiarto dan Wardani, 2005) Keadilan procedural merupakan suatu fungsi dari sejauh mana jumlah aturan-aturan procedural dipatuhi atau dilanggar. Aturan-aturan tersebut mempunyai dampak yang sangat penting karena dianggap sebagai manifestasi nilai-nilai proses dasar dalam organisasi setiap organisasi membutuhkan membutuhkan pengendalian didalamnya agar mencapai tujuannya

Robins dan Judge (2007) dalam Kurniawan (2011) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan seseorang dimana individu memihak suatu organisasi beserta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, maka pegawai tersebut cenderung tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. Sebaliknya, jika pegawai memiliki komitmen yang rendah terhadap organisasinya, maka pegawai cenderung akan melakukan hal-hal yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi demi tujuan pribadinya sendiri. Salah satu contoh tindakan tersebut adalah kecurangan. Pegawai tersebut akan merasionalisasi tindakannya dikarenakan pegawai tersebut tidak memiliki penerimaan yang baik atas nilai-nilai dan tujuan organisasi.

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan pada sector pemerintah. Diantaranya dilakukan oleh Kurnia Adi, Komala, Arum Ardianingsih (2016) mengenai analisis faktor-faktor penentu kecurangan (fraud) pada sector pemerintahan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Pekalongan. Variabel bebas yang digunakan adalah penegakan hukum, efektifitas pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural, budaya etis organisasi dan komitmen organisasi. Sedangkan variable terikatnya adalah kecurangan di sector pemerintah. Dari hasil penelitian tersebut pengaruh penegakan hokum tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (fraud). Pengaruh efektifitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Pengaruh asimetri informasi berpengaruh yang signifikan terhadap kecurangan. Pengaruh kesesuaian kompensasi berpengaruh yang tidak signifikan terhadap kecurangan. Keadilan procedural berpengaruh tidak signifikan terhadap kecurangan. Pengaruh budaya etis organisasi berpengaruh yang tidak signifikan terhadap kecurangan. Sedangkan komitmen organisasi berpengaruh yang signifikan terhadap kecurangan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh suryana dan sadeli (2015) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. Variable bebas yang digunakan adalah lingkungan kerja, personal attitude, dan system administrasi. Sedangkan variable terikatnya adalah fraud (kecurangan). Dari hasil penelitian tersebut diketahui lingkungan kerja, personal attitude, dan system administrasi berpengaruh signifikan terhadap fraud (kecurangan).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Adinda (2015) mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*) di sector pemerintah Kabupaten Klaten. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh keefektifan pengendalian internal, kultur organisasi, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, keadilan distributive, keadilan procedural dan komitmen organisasi. Sedangkan variabel terikatnya adalah kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Dari hasil penelitian tersebut diketahui pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Kultur organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah. Keadilan distributive tidak berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Keadilan procedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sector pemerintahan.

Berdasarkan dari fenomena diatas dan kesenjangan temuan penelitian (*research gap*) dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang **berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (*Fraud*) Pada Sektor Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk mengantisipasi masalah agar pembahasan masalah tidak meluas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis hanya membahas tentang pengaruh keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural dan komitmen organisasi.
2. Lokasi penelitian hanya pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara dengan subjek penelitian yaitu: seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di BPKAD Kabupaten Jepara.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Keefektifan Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Kecurangan pada Sector Pemerintah?
2. Apakah Asimetri Informasi Berpengaruh terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah?
3. Apakah Penegakan Hukum Berpengaruh terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah?
4. Apakah Kesesuaian Kompensasi Berpengaruh terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah?
5. Apakah Keadilan Procedural Berpengaruh terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah?

6. Apakah Komitmen Organisasi Berpengaruh terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah?
7. Apakah Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Penegakan Hukum, Kesesuaian Kompensasi, Keadilan Procedural dan Komitmen Organisasi Berpengaruh terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecurangan pada sektor pemerintah pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan pada sektor pemerintah pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan pada sektor pemerintah pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan pada sektor pemerintah pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.
5. Untuk mengetahui pengaruh keadilan procedural terhadap kecurangan pada sektor pemerintah pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.

6. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan pada sektor pemerintah pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.
7. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural dan komitmen organisasi terhadap kecurangan pada sektor pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan pengetahuan mengenai kecurangan pada sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan tersebut, diantaranya adalah faktor keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural dan komitmen organisasi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk latihan melakukan penelitian sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan penelitian terkait dengan tindak kecurangan pada instansi pemerintahan.

b. Bagi instansi

Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan kinerja akuntansi pada bagian keuangan sehingga diharapkan tidak adanya kecurangan-kecurangan yang merugikan instansi.

c. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai terhadap penelitian yang sejenis dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud) pada Sektor Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.” tersusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I PENDAHULUAN, yaitu bab yang menjadi pengantar yang menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian dilakukan. Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- b. Bab II TINJAUAN PUSTAKA, berisi teori-teori yang menjadi sumber terbentuknya suatu hipotesis, juga acuan untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.
- c. Bab III METODE PENELITIAN, menjelaskan metode-metode dan variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional,

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

- d. Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN, memberikan gambaran umum objek yang diteliti, deskripsi variabel, juga pengolahan data yang didapat, dan pembahasan yang menjelaskan data tersebut.
- e. Bab V PENUTUP, akan diakhiri dengan kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab terdahulu dan saran-saran perbaikan untuk masa yang akan datang.